

Judul : Asean+ Youth Summit 2023: Pemuda Kita Butuh Pendidikan Berkualitas
Tanggal : Selasa, 19 September 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

ASEAN+Youth Summit 2023 Pemuda Kita Butuh Pendidikan Berkualitas



Puteri Anetta Komaruddin

ANGGOTA Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Puteri Anetta Komaruddin mendorong adanya pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi pemuda. Hal ini sebagai upaya menuntaskan ketimpangan pendidikan yang terjadi saat ini.

Hal tersebut dilontarkan Puteri saat menjadi panelis pada diskusi bertajuk 'Pondasi Masa Depan (Foundations of the Future)' dalam rangkaian puncak acara ASEAN+Youth Summit 2023, Jumat (8/9) di Jakarta Concert Hall.

Kegiatan ASEAN+Youth Summit ini diisi berbagai diskusi tematik dengan menghadirkan sejumlah tokoh muda dari berbagai negara.

Puteri mengatakan, ketimpangan pendidikan masih menjadi persoalan serius yang dihadapi Indonesia. Upaya menghadirkan kualitas pendidikan yang merata masih dihadapkan dengan berbagai tantangan multidimensi yang sifatnya geografis, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

"Pendidikan kita masih timpang antara sekolah di area perkotaan dan area pedesaan. Bahkan, sekitar 60 persen

sekolah dasar di Indonesia mengalami kerusakan. Saya juga masih sering menemukan sekolah dasar yang rusak di daerah pemilihan saya," kata anggota Komisi XI DPR ini.

Ketimpangan pendidikan ini, semakin terasa ketika pandemi, terutama akibat disparitas infrastruktur digital. Dampaknya, muncul masalah sosial negatif, seperti putus sekolah, *learning loss*, kekerasan pada anak dan pernikahan dini.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat pandemi menyebabkan angka putus sekolah di tingkat sekolah dasar melonjak 10 kali lipat.

"Angka putus sekolah ini banyak didominasi dari keluarga tidak mampu secara ekonomi," ucap politisi Fraksi Golkar ini.

Politisi muda yang akrab disapa Putkom ini mengungkap, berbagai permasalahan pendidikan ini terus menjadi perhatian DPR dan Pemerintah Indonesia. Di antaranya dengan konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya.

Menurutnya, tahun ini, Pemerintah mengalokasikan anggaran belanja untuk sektor pendidikan sebesar Rp 608 triliun. Anggaran tersebut terbagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Rp 233,9 triliun untuk Program Indonesia Pintar kepada 20,1 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah kepada 976,8 ribu mahasiswa.

"Selain itu, anggaran ini juga dialokasikan untuk tunjangan profesi guru baik untuk yang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non PNS, ini juga tetap akan disediakan," jelasnya. ■ KAL